

PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN

JURNAL

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)



Oleh :

Bernadetta Rumondang F S
NIM. 146010100111013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN

Bernadetta Rumondang F S¹, Masruchin Ruba'i², Bambang Sugiri³

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: dettagracia@yahoo.com

Abstract

This journal writing is aim to analyze and study wether halting command letter for quest is the only one prequirement to submit test about legal or not investigation halting through pretrial investigation and to analyze and assess the new formulation of the Termination of the Investigation within the KUHAPidana (book of judicial procedure of Criminal Law) in the future. This journal is compiled using normative, juridical research method with respect to its approach to legislation, concept and case so that based upon the result of this Journal, it was demonstrated that Warrant for Termination of Investigation (SP3) is not the sole requirement to file a request that the investigation be evaluated through the Pretrial Institution, whereas the formulation of the Warrant for Termination of Investigation within the renewal of KUHAPidana (book of judicial procedure of Criminal Law) in the future is to reformulate some of the provisions on the definition of Investigation and also to reformulate the time limit of Investigation. This reformulation is intended to provide legal assurance for those who report crimes, crime victims and criminal suspect, which there is no clarity or clear reason while still at the level of the Indonesian National Police Investigation.

Key words: *investigation halting, pretrial investigation, Warrant for Termination of Investigation (SP3)*

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan serta menganalisis dan mengkaji formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang. Jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, sedangkan formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang adalah dengan merumuskan beberapa pasal tentang pengertian penghentian penyidikan, serta batas waktu penyidikan, formulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang perkara pidananya berlarut-larut tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan.

Kata kunci: Penghentian Penyidikan, Lembaga Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, maka dikenal ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada hak-hak perseorangan.

Selain itu prinsip-prinsip di atas, yang menjadi ciri khas dari suatu negara hukum adalah penegakan hukum.⁴ Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum.⁵ Dalam praktek, kepastian hukum lebih identik dengan peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sempurna. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981⁶ atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (atau disingkat KUHAPidana)⁷ yang berlaku di Indonesia.

⁴ **Penegakan hukum** adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 57-67.

⁵ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, (W.I pada Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), hlm. 4.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76.

⁷ **Norma** dalam Hukum Acara Pidana adalah mengatur atau memerintah atau melarang untuk bertindak dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadinya perbuatan pidana agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara, Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 2010), hlm. 10.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketidaksempurnaan KUHAPidana yang berlaku di Indonesia ini dalam pelaksanaannya, muncul berbagai persoalan terkait dengan proses penegakan yang belum ada pengaturannya, khususnya ketentuan-ketentuan terkait dengan hak-hak Pelapor, Korban dan Tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukumnya. Dalam pelaksanaannya, dari rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam KUHAPidana, ternyata belum ada pengaturan mengenai batas waktu proses penyidikan suatu perkara pidana. Tidak adanya batas waktu penyidikan, dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk kekosongan hukum, yang berimplikasi pada proses penyidikan yang lama dan berlarut-larut.

Dengan berlarut-larutnya penanganan suatu perkara pidana sampai dengan bertahun-tahun tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pelapor / Korban Tindak Pidana sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, demikian juga bagi Tersangka, karena dengan berlarut-larutnya penyidikan suatu perkara pidana dapat menjadikan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus menyandang status Tersangka sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga atas tindakan Penyidik yang dengan sengaja “menelantarkan” suatu perkara pidana, menunjukkan adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan ketidakseriusan Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat sebagaimana dalam Putusan Praperadilan sebagai contoh kasus dalam jurnal ini, yang di antaranya sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor: 5/Prp./1982/PN.UP, tanggal 14 Desember 1982;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1816 K/Pid/2009 *jo* Nomor: 179/Pid/2009 PTR *jo* Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN. Bkn, tanggal 12 Januari 2011;
3. Putusan Perkara Nomor: 1447 K/Pid/2012 *jo* Nomor: 01/Pra.Per/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 19 Desember 2012;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 02/Pra.Pid/2012/PT.Mdn *jo* Nomor: 34/Pra.Pid./2012/PN-Mdn, tanggal 8 Januari 2013;

5. Putusan Perkara Nomor: 02/Pra.Pid/2015/PN.Kdr, tanggal 18 Juni 2015; yang ternyata, kesemuanya merupakan permasalahan yang berakar dari tidak adanya ketentuan dalam KUHAPidana yang mengatur tentang batas waktu penyidikan.

Berdasarkan contoh kasus tersebut diatas, terhadap tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib, maka Pelapor atau Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permintaan pemeriksaan melalui Lembaga Praperadilan, yaitu untuk dilakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Sekalipun terdapat permohonan yang diterima atau dikabulkan oleh Hakim Lembaga Praperadilan dengan pertimbangan hukum, bahwa sekalipun, fakta persidangan tidak pernah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penyidikan, tetapi di sisi lain, ada pula permohonan pengujian tentang adanya penghentian penyidikan yang ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa atas tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana, sepanjang tidak diterbitkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan termasuk penghentian penyidikan dan karenanya, bukan menjadi obyek dari Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan. Apalagi dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia, tidak memuat ketentuan mengenai pengertian penghentian penyidikan, sehingga mengakibatkan adanya penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan penghentian penyidikan.

Adanya fakta hukum yang demikian ini, semakin menunjukkan bahwa telah terjadi kekaburan hukum terhadap Pasal 77 KUHAPidana terkait dengan wewenang Lembaga Praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan sebagai salah satu obyek / ruang lingkup Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia, dan dengan ditolaknya Permohonan Praperadilan tentang adanya suatu penghentian penyidikan dengan tidak adanya tindak lanjut dan kejelasan dari Penyidik, dengan pertimbangan hukum karena tidak adanya formalitas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik dan diberitahukan kepada

Pelapor atau Korban Tindak Pidana maupun Tersangka, justru mengakibatkan perkara pidana tersebut tidak juga mendapat tindak lanjut dan berlarut-larut sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, dengan demikian menunjukkan bahwa Lembaga Praperadilan belum mampu memberikan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka yang perkara pidananya tidak ditindaklanjuti ditingkat penyidikan.

Belakangan ini, ruang lingkup Praperadilan telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yaitu tentang Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan, yang sempat menjadi polemik dalam masyarakat, namun ternyata, dalam Putusan tersebut juga belum ada pengaturan yang mencakup secara rinci dan jelas tentang batas waktu penyidikan dan definisi penghentian penyidikan sebagai salah satu obyek Praperadilan, yang juga merupakan wewenang dari penyidik dan bagian dari proses penyidikan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyek praperadilan tersebut juga belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pelapor atau Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang perkara pidananya dengan sengaja tidak ditindaklanjuti ditingkat penyidikan.

Parahnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, yang telah menghapus Pasal 83 ayat 2 KUHAPidana serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984⁸, tentang upaya pemeriksaan di tingkat banding terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan, padahal, apabila dilihat dari tujuan pembentukan Lembaga Praperadilan adalah sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap adanya kemungkinan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum yang sewenang-wenang dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara pidana, termasuk dalam hal sengaja tidak menindaklanjuti atau dengan sengaja menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984, yang isinya: *“Sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding; kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi. Dengan pertimbangan itu, terhadap putusan – putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi”*

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa dengan belum adanya pengaturan yang jelas tentang batas waktu penyidikan serta pengertian penghentian penyidikan yang merupakan bagian dari proses penyidikan, serta menjadi ruang lingkup Praperadilan, telah menciptakan kekosongan hukum serta kekaburan hukum, khususnya dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dikhawatirkan, dalam pelaksanaan proses penegakan hukum pidana dalam ranah hukum formil di masa yang akan datang belum mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor atau Korban Tindak Pidana maupun Tersangka sebagai masyarakat pencari keadilan dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat permasalahan hukum normatif yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu: Apakah pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan hanya didasarkan pada adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Bagaimana formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang.

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan praperadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, bahan seminar, media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

Pembahasan

A. Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan

1. Surat perintah penghentian penyidikan

Istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (atau dikenal secara singkat dengan SP3), memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAPidana yang

berlaku di Indonesia. KUHPidana hanya mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2, yang isinya,

“dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum yang isinya menerangkan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, melainkan terhadap suatu perkara pidana yang sudah ada Laporan Polisi / Pengaduan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pada saat, Penyidik memulai tindakan penyidikan, maka yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan adalah SPDP⁹, sehingga kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, namun, kewajiban melakukan pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, karenanya, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak

⁹ Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Perkara Pidana*, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹⁰

Dalam pelaksanaannya, sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, terkait dengan apakah proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana ini dihentikan atau sebenarnya, berkasnya sudah diserahkan ke penuntut umum, namun dikembalikan kepada Penyidik karena kurang cukup alat bukti (P-19). Adanya proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang berlarut-larut dan tidak ada kejelasan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan melanggar ketentuan dalam KUHAPidana terkait dengan hak-hak Tersangka yang dilindungi, yaitu sebagaimana dalam Pasal 50 KUHAPidana, yang isinya:

- Pasal 50 ayat 1 KUHAPidana, *“Tersangka mendapatkan hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum”*,
- Pasal 50 ayat 2 KUHAPidana, *“Tersangka mendapatkan hak agar perkaranya dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum”*, dan
- Pasal 50 ayat 3 KUHAPidana, *“Terdakwa mendapatkan hak untuk segera diadili di pengadilan”*.

Selain melanggar hak-hak Tersangka, dengan tidak adanya kejelasan terhadap proses penyidikan suatu perkara pidana, justru menunjukkan bahwa hukum dan aparat penegak hukum belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi Korban / Pelapor Tindak Pidana, karenanya **Husein Harun** berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan lamanya proses penyidikan ini, diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yang dilakukan dengan¹¹:

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada Penuntut Umum, atau

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 54.

¹¹ Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 29.

2. Penuntut Umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam KUHPidana belum ada ketentuan yang memuat tentang definisi penghentian penyidikan. KUHPidana hanya mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, yaitu bila ternyata tidak terdapat cukup alat bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHPidana), pengaduan atas peristiwa pidana dicabut (khusus delik aduan) (Pasal 75 KUHPidana) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) (Pasal 76 KUHPidana).

Dalam prakteknya, ternyata tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kemungkinan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan tanpa alasan atau alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru ditafsirkan dengan tidak tepat, atau bahkan, terdapat alasan-alasan diluar ketentuan KUHPidana, sehingga seolah-olah, Penyidik secara diam-diam telah melakukan penghentian penyidikan, yang karenanya tidak ada kewajiban Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Melihat permasalahan hukum yang demikian, khususnya adanya kekaburan hukum dalam KUHPidana, beberapa doktrin, akademisi dan ahli hukum pidana telah mendefinisikan penghentian penyidikan tidak sebatas pada tindakan Penyidik yang dilakukan berdasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHPidana, melainkan menguraikan tindakan penyidik yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai penghentian penyidikan.

Menurut **Ratna Nurul Afiah**, bahwa penghentian penyidikan dalam hal ini berarti, perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri,¹² yang berarti, dengan tidak segera dilimpahkannya berkas perkara pidana dari Penyidik, ke Penuntut

¹² Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm. 83.

Umum dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini, Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan. Sedangkan, **Nur Hidayat** mendefinisikan penghentian penyidikan merupakan tindakan Penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan korban.¹³ Demikian halnya, sebagaimana tertuang dalam *Judex Factie* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 01/Pra.Peradilan/2009/PN.Bkn, tanggal 1 April 2009, menyebutkan belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu hasil putusan kasasi tersebut merupakan penghentian penyidikan, dapat dilihat asal kata “penghentian” berasal dari kata “henti” (berhenti): tidak bergerak, tidak berfungsi, mengundurkan diri dari jabatan, tidak aktif dari kegiatan tertentu, tamat, berakhir, selesai, istirahat sejenak. (lihat kamus lengkap bahasa Indonesia, karangan drs. Solehan Yasin, hal. 206), jadi jelas bahwa “belum dapat melanjutkan karena masih menunggu putusan kasasi” adalah tidak aktif dalam kegiatan tertentu (penyidikan) oleh polisi atau Termohon Kasasi. Sudah dapat diartikan “penghentian” penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan, tidak semata-mata terbatas pada formalistik Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan sampai berlarut-larut tidak juga ada kejelasan terhadap suatu perkara pidana yang telah dilaporkan oleh Pelapor / Korban Tindak Pidana.

Dalam beberapa kasus yang telah diuraikan pada bagian latar belakang Jurnal ini, seolah-olah Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan, sekalipun tidak pernah diterbitkan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan alasan penghentian yang paling sering digunakan adalah kurangnya alat bukti.

Dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengklasifikasikan tersendiri antara, barang bukti, bukti permulaan, bukti yang cukup dan alat bukti, yang masing-masing definisinya

¹³ Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, *Jurnal “Yustitia” Vol. 10, No. 1*, (November, 2010): v.

terurai dalam Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang telah menguraikan definisi dari barang bukti, bukti permulaan, bukti yang cukup dan alat bukti tersebut di atas, maka, secara jelas dapat dijadikan sebagai ukuran bagi Penyidik untuk menjalankan wewenangnya, baik untuk melakukan upaya paksa maupun upaya yang bersifat administrasi dalam penanganan suatu perkara pidana, dalam hal ini, dapat dilihat bahwa ketentuan dalam KUHAPidana mewajibkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti” mengandung pengertian bahwa dalam hal Penyidik melakukan penangkapan diperlukan bukti permulaan, yang terdiri dari Laporan Polisi dan 1 (*satu*) alat bukti yang sah (dalam hal ini, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), sedangkan untuk melakukan penahanan, diperlukan bukti yang cukup, yaitu Laporan Polisi dan 2 (*dua*) alat bukti yang sah (dalam hal ini, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).

2. Pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), ternyata penerapan hukum acara perdata dalam acara pengujian praperadilan ini menjadi kelemahan Lembaga Praperadilan. Dalam penelitiannya, ICJR mengungkapkan bahwa Lembaga Praperadilan diatur secara singkat tanpa dilengkapi dengan prosedur atau tata cara bersidang yang memadai, akibatnya, prosedur praperadilan yang meski dalam ranah hukum acara pidana, justru dalam prakteknya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata, yang hasilnya, menunjukkan bahwa praktek praperadilan selama ini telah gagal dalam menjamin pemenuhan minimum dari hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana.

Dari uraian tentang penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan praperadilan, secara khusus pemeriksaan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan oleh Penyidik, menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan Lembaga Praperadilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, yaitu sebagai mekanisme kontrol dalam penegakan hukum pidana dan melindungi

hak-hak Tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan, yaitu baik Pelapor maupun Korban Tindak Pidana, namun demikian, hukum acara perdata memberikan ruang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran, yaitu dengan melakukan persangkaan, sehingga Hakim berdasarkan fakta yang ada, dapat menilai bahwa suatu perkara pidana yang berlarut-larut, tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan juga merupakan penghentian penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya penghentian penyidikan, tidak semata-mata dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi dengan Penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan polisi atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, maka Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan. Selain itu, Surat Penghentian Penyidikan (SP3) bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik melalui Lembaga Praperadilan, sehingga dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan yang perkara pidananya dihentikan sampai dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan. Dalam hal ini, menjadikan Lembaga Praperadilan tidak kehilangan fungsi serta tujuan dibentuknya, yaitu sebagai mekanisme kontrol, baik secara vertikal maupun secara horisontal, serta sebagai upaya hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum dari tindakan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik dalam proses penyidikan suatu perkara pidana yang telah dilaporkan. Selain itu, Surat Penghentian Penyidikan (SP3) juga bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim Praperadilan dalam memutus sah tidaknya suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

3. Pertimbangan hakim praperadilan dalam memutus permohonan pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan

a. Analisis penetapan nomor: 5/Prp./1982/PN.UP

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor: 5/Prp./1982/PN.UP, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1982 oleh

Pengadilan Negeri Ujungpandang dan telah berkekuatan hukum tetap, telah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Andi Saripada selaku Pelapor atas terjadinya tindak pidana pembunuhan dan telah dilaporkan ke Kepolisian KOTABES 146, Ujungpandang.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ujungpandang, sekalipun Penetapan tersebut ditetapkan pada tahun 1982, pasca diberlakukannya hukum acara pidana di Indonesia, dapat dilihat bahwa ternyata ada penetapan praperadilan yang mengabulkan permohonan pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, padahal Pemohon Praperadilan di depan persidangan tidak mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Adapun amar putusannya, Hakim Praperadilan hanya mengabulkan permohonan sebagian, dan atas tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti perkara pidana Pemohon Praperadilan bukan merupakan suatu penghentian penyidikan, namun dari pertimbangan hukumnya, Hakim telah memberikan persangkaan, yang ditarik dari fakta di persidangan, berupa bukti surat bukan akta dan keterangan saksi, yang ternyata telah terang bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Pemohon Praperadilan tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Praperadilan (Penyidik), sehingga dalam hal ini, dianggap bahwa penyidikan telah terhenti, dan karenanya Penyidik wajib untuk melanjutkan penyidikan.

b. Analisis putusan nomor: 1816 K/Pid/2009 jo nomor: 179/Pid/2009/PTR jo nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN. Bkn

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1816 K/Pid/2009, yang diputus pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkekuatan hukum tetap, telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terbanding / Pemohon Praperadilan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 179/Pid/2009/PTR, yang mana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN.Bkn. Adapun permohonan Praperadilan ini

diajukan oleh Korban Tindak Pidana atas terjadinya tindak pidana pemalsuan akta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STPL/197/K/VII/2008/SPK.

Berdasarkan putusan kasasi atas permohonan praperadilan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dasar hukum yang digunakan Hakim sebagai dasar untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan / Terbanding / Pemohon Kasasi ini, adalah bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 A ayat 2 sub a Undang- Undang No. 5 Tahun 2004, sebagai perubahan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985, mengatur bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi serta Pasal 83 ayat 1 KUHAPidana, bahwa terhadap putusan praperadilan sebagaimana Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 2, yaitu bahwa terkait dengan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi di wilayah hukum yang bersangkutan, yang sejak tahun 2011, permintaan putusan akhir ditingkat banding juga dihapus sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, yang telah menghapus Pasal 83 ayat 2 KUHAPidana serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984¹⁴, tentang upaya pemeriksaan di tingkat banding terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan, sehingga dalam hal ini, upaya hukum terhadap putusan praperadilan sangat dibatasi, sedangkan KUHAP belum menyediakan upaya hukum lain, yang dapat ditempuh oleh Pelapor / Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang perkara pidananya tidak mendapat tindaklanjut di tingkat penyidikan.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984, yang isinya: “Sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding; kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi. Dengan pertimbangan itu, terhadap putusan – putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi”

Selain pertimbangan tidak pernah adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Hakim di tingkat banding mempertimbangkan, bahwa ternyata dalam persoalan *a quo*, terdapat perkara pidana lain, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi, dan ada keterkaitannya dengan perkara pidana yang dimohonkan pengujian melalui Lembaga Praperadilan ini, atau dalam pertimbangannya, Hakim meng-istilah-kan sebagai bentuk penangguhan. Adapun penangguhan suatu perkara pidana, dapat dilakukan apabila ternyata, di dalam perkara pidana tersebut terdapat status keperdataan yang harus ditentukan terlebih dahulu antara kedua pihak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang isinya, bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Dalam hal ini, pertimbangan Hakim di tingkat banding yang telah memberikan pertimbangan yang salah dan keliru, justru telah menunjukkan kesesatan dalam menerapkan hukum, dan dalam hal ini, telah mengesampingkan kepastian hukum bagi Pemohon Praperadilan.

Adapun dalam putusan Hakim tingkat banding, yang membenarkan tindakan Penyidik (Termohon Praperadilan), sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa dalam hal ini, Penyidik hanya melakukan penangguhan perkara dengan menunggu diputusnya pemeriksaan di tingkat Kasasi hingga berkekuatan hukum tetap, Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa hal tersebut dikarenakan penumpukan perkara di tingkat Kasasi, justru menunjukkan lambatnya penanganan perkara melalui jalur litigasi di Indonesia, dan seharusnya alasan yang seperti ini tidak perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, karena sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merupakan pengingkaran Lembaga Peradilan terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pertimbangan hukum yang demikian ini, seolah-olah, Hakim Praperadilan

lebih berpihak kepada Penyidik dan mengesampingkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, yang telah dibuktikan oleh Pemohon Praperadilan di depan persidangan, yang hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana, yang mana Hakim harus bersikap adil dengan mendengarkan kedua belah pihak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Lembaga Praperadilan belum mampu memberikan perlindungan hukum dari tindakan Penyidik yang sewenang-wenang, yang apabila pertimbangan-pertimbangan yang demikian ini, diterapkan pula dalam putusan yang lain, tentunya akan berdampak negatif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Analisis putusan nomor: 1447 K/Pid/2012 jo nomor: 01/Pra.Per/2012/PN.Jkt.Ut

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1447 K/Pid/2012, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkekuatan hukum tetap, telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Praperadilan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 01/Pra.Per/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Maret 2012, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah menolak permohonan praperadilan, yang diajukan oleh Soeparno. Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan atas terjadinya tindak pidana penggelapan dengan menghilangkan barang bukti akta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 51/23/K/01/2001/Res.JU.

Dalam KUHAPidana, memang sangat dibatasi ruang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran hukum guna menemukan hukumnya, namun dengan diterapkannya hukum acara perdata dalam pemeriksaan suatu perkara yang dimohonkan pengujian melalui Lembaga Praperadilan, maka konsekuensinya, Hakim Praperadilan haruslah melihat kepentingan para pihak, dengan bersikap adil untuk mendengarkan kedua belah pihak, yang dalam perkara ini, dengan tidak ada tindak lanjut suatu perkara pidana hampir 12 (*dua belas tahun*) di tingkat penyidikan, maka Hakim Praperadilan dengan persangkaannya dan secara bijaksana harus mampu

menilai, bahwa Penyidik dalam hal ini telah melakukan penghentian penyidikan.

Di sisi lain, pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan, merupakan wewenang dari Lembaga Praperadilan, yang mana Hakim harus mampu melihat bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam KUHPidana saat ini, sehingga banyak perkara pidana yang berlarut-larut dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan ini, adalah tidak adanya batas waktu penyidikan, sedangkan upaya hukum yang ada terbatas pada permintaan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, yang menurut beberapa ahli dalam hukum pidana, sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya, bahwa tidak hanya ‘*leterlijk*’ pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga upaya yang dapat ditempuh, yang dibentuknya dilatarbelakangi oleh prinsip Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum hanyalah dengan melakukan pengujian terhadap tindakan penyidik yang dalam perkara ini, karena tidak mungkin bagi Pelapor / Korban Tindak Pidana membuat Laporan Polisi baru, mengingat berlakunya ketentuan dalam KUHPidana, yaitu sebagaimana dalam Pasal 76 tentang *ne bis in idem* serta Pasal 78 tentang daluwarsa.

d. Analisis putusan nomor: 02/Pra.Pid/2012/PT. Mdn jo nomor: 34/Pra.Pid./2012/PN. Mdn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 02/Pra.Pid/2012/PT. Mdn, yang diputus pada tanggal 8 Januari 2013 oleh Pengadilan Tinggi Medan dan telah berkekuatan hukum tetap, telah menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Termohon Praperadilan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 34/Pra.Pid./2012/PN. Mdn, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wagiman. Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh Korban Tindak Pidana atas terjadinya tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan dan memasuki rumah tanpa izin pemiliknya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/117/IX/SPKT.

Bilamana merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, yang telah menghapus Pasal 83 ayat 2 KUHPidana serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984¹⁵, tentang upaya pemeriksaan di tingkat banding terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan, maka seharusnya, atas permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dinyatakan ditolak oleh Hakim Praperadilan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang telah menghapus upaya pemeriksaan di tingkat lebih tinggi terhadap putusan praperadilan pada di tingkat pertama.

Selain itu, sebagaimana analisis Penulis terhadap putusan sebelumnya, bahwa Hakim pemeriksa perkara dalam pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan dalam perkara ini, juga mempertimbangkan secara harafiah, bahwa suatu penghentian penyidikan haruslah dibuktikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan dengan Pemohon Praperadilan / Terbanding tidak mampu membuktikan adanya perintah penghentian penyidikan tersebut, maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon Praperadilan telah gagal dalam membuktikan adanya penghentian penyidikan.

Dalam putusannya ini, Hakim pemeriksa perkara di tingkat banding, bahkan menjadikan pernyataan Pemohon Praperadilan / Terbanding sebagaimana dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sebagai bentuk dari pengakuan Pemohon Praperadilan / Terbanding.¹⁶ Dengan demikian, sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya terkait dengan alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata, bahwa dengan adanya pengakuan dari pihak lawan,

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984, yang isinya: “Sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding; kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi. Dengan pertimbangan itu, terhadap putusan – putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi”.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 02/Pra.Pid/2012/PT. Mdn jo Nomor: 34/Pra.Pid./2012/PN. Mdn, *op.cit*, hlm. 6.

maka pihak yang mendalilkan tidak perlu membuktikan dan suatu perkara yang disengketakan tersebut dianggap selesai, dan dalam hal ini, Hakim tidak perlu mencari kebenaran daripada pengakuan itu sendiri.

Sedangkan terkait dengan pertimbangan Hakim yang merujuk pada berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tentang penangguhan perkara pidana apabila terdapat hal keperdataan di antara kedua belah pihak yang harus diputuskan terlebih dahulu, dalam hal ini, tidak semata-mata dapat diterapkan begitu saja. Hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang pada pokoknya, bahwa penangguhan tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila tidak diperlukan lagi, serta Pasal 3, yang berisi bahwa pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, dengan demikian, diperlukan kemampuan bagi Hakim untuk menilai perlu tidaknya suatu penangguhan perkara, yang pada prinsipnya agar tidak bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, mencegah adanya celah hukum bagi pelaku tindak pidana, yang tujuannya hanya untuk mengulur waktu atau bahkan menghilangkan alat bukti.

e. Analisis putusan nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Kdr

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Kdr, yang diputuskan pada tanggal tanggal 18 Juni 2015 oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah berkekuatan hukum tetap, telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Johanes Robert selaku Korban Tindak Pidana atas terjadinya tindak pidana pemalsuan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 298/K/IX/2000/ Resta Kdr.

Dari 4 (*empat*) putusan praperadilan, yang telah Penulis analisis, terkait dengan adanya penghentian penyidikan perkara pidana di tingkat penyidikan, perkara pidana sebagaimana dalam putusan praperadilan ini yang lebih menarik bagi Penulis, namun dengan tidak mengesampingkan putusan lain, yang pada prinsipnya memang merupakan persoalan hukum yang dilatarbelakangi oleh sebab yang sama, yaitu terkait dengan

penghentian penyidikan tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila dibandingkan dengan jangka waktu penghentian penyidikan dalam putusan praperadilan sebelumnya, jangka waktu penghentian penyidikan dalam perkara yang telah diputus praperadilan ini terhitung lebih lama dibandingkan perkara yang telah diputus praperadilan sebelumnya, yaitu ± 14 (*empat belas*) tahun.

Adapun dasar pertimbangan Hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam perkara ini, bahwa Pemohon Praperadilan tidak dapat membuktikan adanya penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sama halnya dengan pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya, bahwa dalam hal ini, Hakim secara harafiah mempertimbangkan bahwa disebut sebagai penghentian penyidikan, apabila telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti berupa surat bukan akta, yang oleh Undang-undang, merupakan bukti surat yang sah pula, sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-13, berupa laporan polisi, yang membuktikan bahwa benar atas peristiwa pidana tersebut telah dilaporkan dan surat-surat yang ditujukan kepada Termohon Praperadilan terkait dengan pertanyaan mengenai perkembangan perkara serta permohonan tindaklanjut, yang ternyata juga tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Praperadilan, yang seharusnya, Hakim dapat menarik kesimpulan dengan persangkaannya bahwa benar telah terjadi penghentian penyidikan, apalagi jangka waktu sejak adanya Laporan Polisi hingga diajukannya permohonan pengujian melalui Lembaga Praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan sangat lama, yaitu 14 (*empat belas*) tahun, sehingga dalam hal ini, patutlah Hakim menilai bahwa penyidikan suatu perkara pidana di tingkat penyidikan yang berlarut-larut, bahkan sampai dengan 14 (*empat belas*) tahun tidak juga segera dilimpahkan ke Penuntut Umum, maka Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan. Namun, sebaliknya, Hakim menolak permohonan Praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, dalam hal ini, Pelapor / Korban Tindak Pidana.

Salah satu pertimbangan hukum Hakim dalam menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, bahwa dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, dalam hal ini, Penyidik, dapat dilihat, bahwa ternyata Termohon masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan terus melakukan penyidikan guna menemukan suatu tindak pidana yang disangkakan terhadap diri Sdr. Mochtar hadi, sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon, dan Termohon juga telah melaporkan perkembangan hasil penyidikan kepada pemohon, sehingga Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan atas tindak pidana tersebut.¹⁷ Adapun ternyata, bukti surat yang diajukan oleh Penyidik / Termohon Praperadilan di depan persidangan, berupa surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan jabatan, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan berita acara gelar perkara dikeluarkan di tanggal yang berdekatan dengan diajukannya permohonan praperadilan¹⁸, serta bukti berupa dokumentasi penyerahan SP2HP, yang tidak ada aslinya, yang sesuai dengan Yurisprudensi hukum acara perdata, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985¹⁹ serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/1996²⁰, bahwa terhadap bukti surat tanpa ada aslinya haruslah dikesampingkan, yang ternyata atas bukti dokumentasi SP2HP tersebut, justru dipertimbangkan sebagai alat bukti Termohon untuk menguatkan penyangkalan atau bantahannya.

Apabila dianalisis kembali dengan persoalan dalam perkara ini, yang mana sebenarnya atas Laporan Polisi, yang juga diajukan oleh Pemohon Praperadilan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara praperadilan ini, telah diakui oleh pula oleh Termohon, yaitu Penyidik, maka seharusnya sebagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, pengakuan tersebut merupakan alat bukti, yang tidak perlu lagi dibuktikan

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Kdr, *op.cit.*, hlm. 18.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Kdr, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985, yang isinya “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang isinya “fotocopy surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”.

kebenarannya, dikuatkan pula dengan bukti surat yang lain, yaitu berupa berita acara penyitaan (P-4),²¹ maka sebenarnya dalam perkara ini telah terpenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, dan karenanya dapat dilakukan penangkapan. Apabila dalam perkara pidana yang sudah berjalan selama 14 (*empat belas*) tahun ini, ternyata belum dilakukan pemanggilan terhadap Terlapor, padahal hukumnya secara jelas mengatakan bahwa sebenarnya telah ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan, maka dalam hal ini secara jelas, telah terjadi penyalahgunaan wewenang Penyidik di tingkat penyidikan, dan wewenang Pengadilan yang dapat memeriksa serta mengadili penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum pidana hanyalah Lembaga Praperadilan, karenanya demi terciptanya sistem peradilan pidana yang baik, maka diperlukan Hakim yang mampu bersikap adil, yang mampu mengembalikan tujuan dibentuknya Lembaga Praperadilan.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, yang ternyata pertimbangan hukumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Hakim yang tidak tepat dalam menguji sah tidaknya penghentian penyidikan, yang meskipun hal tersebut dianggap bukan sebagai penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHPidana, namun dengan persangkaannya, Hakim dapat menyimpulkan bahwa dengan tidak ada tindak lanjutnya suatu perkara pidana di tingkat penyidikan, maka sebenarnya Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan, sehingga penyidikan wajib untuk dilanjutkan demi kepastian hukum.

B. Formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan kuhapidana di masa yang akan datang

Dikaji dari perspektif politik hukumnya, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Demikian halnya terhadap hukum pidana formil, yang secara formatif, diperlukan suatu adanya pembaharuan. Pembaharuan hukum pidana formal atau hukum acara pidana, khususnya KUHP berorientasi kepada anasir hak asasi manusia, sebagai hak dasar, yang secara kodrati melekat pada diri

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Kdr, *op.cit.*, hlm. 11.

manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas siapapun.²²

Menurut **Lilik Mulyadi**, pembaharuan hukum acara pidana, nantinya berorientasi pada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara, lebih tegasnya, apakah berorientasi kepada asas atau sistem akusatur (*accusatorial common law courts*) atau inkuisitur (*the inquisitorial ecclesiastical courts*) atau justru berorientasi pada asas campuran dari kedua sistem tersebut di atas (*the mixed type*).²³

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta mengingat bahwa KUHAPidana yang bersifat limitatif, maka menurut Penulis perlu dilakukan formulasi terkait dengan ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam KUHAPidana yang berlaku di masa yang akan datang dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam PerKap Nomor : 12 Tahun 2009 dan PerKap Nomor 14 Tahun 2012 serta MOU yang telah disepakati antara Kejaksaan dengan Kepolisian.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktanya, terdapat Putusan Praperadilan yang menolak Permohonan Praperadilan tentang pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan, dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Praperadilan tidak dapat membuktikan adanya suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) padahal, Surat Perintah Penghentian Penyidikan bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, karena penghentian penyidikan tidak semata-mata hanya ditafsirkan secara harafiah dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik dalam rangka tidak melanjutkan penyidikan suatu tindak pidana yang telah dilaporkan kepadanya.

²² Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 516.

²³ *Ibid.*, hlm. 518.

2. Formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang, dilakukan dengan menambahkan beberapa Pasal, di antaranya :

- a. Menambahkan 1 (*satu*) ayat pada bagian Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia, tentang definisi penghentian penyidikan, yaitu :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

(angka) Penghentian Penyidikan adalah tindakan Penyidik dalam rangka tidak melanjutkan penyidikan suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepadanya.

- b. Menambahkan 1 (*satu*) Pasal pada bagian Batang Tubuh Hukum Acara Pidana Indonesia, tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara, yaitu :

BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENYIDIKAN

Pasal ...

1. Batas waktu penyelesaian perkara pidana di tingkat Penyidikan dihitung maksimum 200 (dua ratus) hari sejak diterbitkannya Laporan Polisi oleh Penyidik.
2. Waktu sebagaimana tersebut diatas, dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan terhadap Tersangka / Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, jika kurang ditambah dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
 - a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan keterangan dokter, atau;
 - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.
3. Pejabat yang berwenang memberi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, yaitu Ketua Pengadilan Negeri;

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pasal ...

1. Penghentian Penyidikan adalah tindakan Penyidik dalam rangka tidak melanjutkan penyidikan suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepadanya.
2. Alasan penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik apabila,
 - a. Tidak terdapat cukup alat bukti;
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Penyidikan pengaduan dicabut (delik khusus);
 - d. Pelaku meninggal dunia;
 - e. Lewat batas waktu atau daluwarsa;
 - f. *Ne bis in idem*.
3. Dalam hal penyidikan terhadap suatu perkara pidana melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal ..., maka Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan.
4. Dalam hal dikembalikannya berkas perkara untuk ketiga kalinya dari Penuntut Umum kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., maka Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan.
5. Dalam hal adanya penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, maka Penyidik wajib memberitahukan adanya penghentian penyidikan yang dimaksud kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya, Korban serta Pelapor Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Harun, Husein M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Purnomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku, 2010.
- Semedi, Bambang. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*. Jakarta: W.I pada Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

Putusan Pengadilan

- Penetapan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor: 5/Prp./1982/PN.UP, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1982.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1816 K/Pid/2009 jo Nomor: 179/Pid/2009/PTR jo Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN. Bkn yang diputus pada tanggal 12 Januari 2011.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1447 K/Pid/2012 *jo* Nomor: 01/Pra.Per/2012/PN.Jkt.Ut, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2012.

Putusan Nomor: 02/Pra.Pid/2012/PT. Mdn *jo* Nomor: 34/Pra.Pid./2012/PN. Mdn, yang diputus pada tanggal 8 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 02/Pra.Pid/2015/PN.Kdr, yang diputus pada tanggal 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014.

Jurnal Ilmiah

Hidayat, Nur. "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya". *Jurnal "Yustitia" Vol. 10, No. 1*, (November 2010): v.